



DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PROSIDING SEMINAR

Penelitian Unggulan Departemen Agribisnis

Bogor, 27 Desember 2013



Editor :

Dwi Rachmina
Rita Nurmalina
Ratna Winandi
Nunung Kusnadi
Burhanuddin
Anna Fariyanti

PROSIDING SEMINAR PENELITIAN UNGGULAN DEPARTEMEN AGRIBISNIS

Bogor, 27 Desember 2013

EDITOR :

Dwi Rachmina
Rita Nurmalina
Ratna Winandi
Nunung Kusnadi
Burhanuddin
Anna Fariyanti

**PROSIDING SEMINAR
PENELITIAN UNGGULAN DEPARTEMEN AGRIBISNIS**
Bogor, 27 Desember 2013

TIM PENYUSUN

PENGARAH :

- Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS (Ketua Departemen Agribisnis)
- Dr. Ir. Dwi Rachmina, MSi (Gugus Kendali Mutu Departemen Agribisnis)
- Dr. Ir. Anna Fariyanti, MS (Unit Penjamin Mutu FEM - IPB)

EDITOR :

- Ketua : Dr. Ir. Dwi Rachmina, MSi
- Anggota : - Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, MS
- Dr. Ir. Ratna Winandi, MS
- Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS
- Dr. Ir. Burhanuddin, MM
- Dr. Ir. Anna Fariyanti, MSi

TIM TEKNIS :

- Tintin Sarianti, SP, MM

DESAIN DAN TATA LETAK :

- Hamid Jamaludin Muhrim, SE

Diterbitkan Oleh :

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Jl. Kamper Wing 4 Level 5 Kampus IPB Dramaga Bogor 16680

Telp/Fax : 0251-8629654

e-mail : depagribisnis@yahoo.com, dep-agribisnis@ipb.ac.id

Website : <http://agribisnis.fem.ipb.ac.id>

ISBN : 978-602-14623-1-7

KATA PENGANTAR

Salah satu tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan penelitian. Dalam rangka mendukung kegiatan penelitian bagi para dosen, Departemen Agribisnis telah melakukan kegiatan Penelitian Unggulan Departemen (PUD) yang dimulai sejak tahun 2011. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi bagi dosen Departemen Agribisnis untuk melakukan kegiatan penelitian sehingga dapat meningkatkan kompetensi di bidangnya masing-masing. Kegiatan PUD tersebut dimulai dari penilaian proposal yang akan didanai dan ditutup oleh kegiatan seminar. Selanjutnya untuk memaksimalkan manfaat dari kegiatan penelitian tersebut, hasil penelitian perlu didiseminasi dan digunakan oleh masyarakat luas. Salah satu cara untuk mendiseminasikan hasil-hasil penelitian tersebut adalah dengan menerbitkan prosiding ini.

Prosiding ini berhasil merangkum sebanyak 10 makalah PUD yang telah diseminarkan pada tanggal 27 Desember 2013. Secara umum makalah-makalah tersebut dapat dibagi menjadi dua bidang kajian, yaitu kajian Bisnis dan Kewirausahaan (7 makalah), dan Kebijakan (3 makalah). Bidang kajian tersebut sesuai dengan Bagian yang ada di Departemen Agribisnis, yaitu Bagian Bisnis dan Kewirausahaan serta Bagian Kebijakan Agribisnis. Dilihat dari metode analisis yang digunakan, makalah yang terangkum dalam prosiding ini sebagian besar menggunakan analisis kuantitatif. Pesatnya perkembangan teknologi komputasi dan ketersediaan software metode kuantitatif mendorong para peneliti untuk memilih metode analisis tersebut. Ke depan metode analisis kajian bidang Agribisnis perlu diimbangi dengan metode analisis kualitatif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir Dwi Rachmina, MSi sebagai ketua tim PUD dan sekaligus sebagai Editor Prosiding ini beserta tim lainnya. Besar harapan kami prosiding ini dapat digunakan dan bermanfaat bukan saja di lingkungan kampus tapi juga bagi masyarakat luas.

Bogor, 1 Februari 2014
Ketua Departemen Agribisnis FEM IPB

Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS

DAFTAR ISI

KAJIAN BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Kajian Usahatani Karet Rakyat di Provinsi Jambi..... Dwi Rachmina, Netti Tinaprilla, Eva Yolynda, dan Feryanto	1
Integrasi Usahatani Padi-Ternak pada Usahatani Kecil di Provinsi Jawa Barat: Komplementer atau Kompetitif? Nunung Kusnadi	19
Kelayakan Investasi Pengusahaan Bioetanol Berbahan Baku Nipah di Indonesia Bagian Timur Rita Nurmalina, Trees A. Pattiasina, dan Nia Rosiana	37
Pengaruh Risiko Produksi dan Harga Terhadap Keputusan Penggunaan Input pada Usahatani Caisim di Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi (<i>The Effect of Price and Production Risks to Decision of Input on Caisim Farming in Nagrak, Sukabumi</i>)..... Anna Fariyanti, M. Firdaus, E. Gunawan, dan H. Harti	51
Pola Usaha Peternakan Ayam Broiler di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Nunung Kusnadi, Anna Fariyanti, Juniar Atmakusuma, Tintin Sarianti, dan Yanti Nuraeni Muflikh	69
Studi Kelayakan Bisnis Mie Kering Jagung 100% Nunung Kusnadi, Rita Nurmalina, Tintin Sarianti, dan Arif Karyadi	93
Analisis Keragaan Kewirausahaan: Daya saing dan Inovasi Peternak Ayam Broiler dalam Pertumbuhan Bisnis Rachmat Pambudy, Henny K. Daryanto, Wahyu Budi Priatna, Burhanuddin, Popong Nurhayati, Siti Jahroh, dan Nia Rosiana	117

KAJIAN KEBIJAKAN

Kajian Rantai Pasok Karet Rakyat di Provinsi Jambi..... Rita Nurmalina, Amzul Rifin, Harmini dan Dwi Nurul Amalia	135
---	-----

Pengkajian Ulang, Perumusan dan Rekomendasi Alternatif Kebijakan serta Strategi bagi Pembangunan Sistem Agribisnis Ayam Ras Pedaging dan Petelur di Indonesia	151
Rachmat Pambudy	
Kajian Subsistem Penunjang Agribisnis Karet di Jambi	177
Ratna W. Asmarataka, Harianto, Suharno, Andriyono K. Adhi, Lukman M. Baga, dan Maryono	

KAJIAN SUBSISTEM PENUNJANG AGRIBISNIS KARET DI JAMBI

Oleh:

**Ratna W. Asmarataka¹⁾, Harianto, Suharno, Andriyono K. Adhi,
Lukman M. Baga, dan Maryono**

Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB
e-mail : ¹⁾ratna.asmarantaka@yahoo.co.id

ABSTRACT

Rubber is a commodity which has great number contribution toward Indonesia economy. Even though Indonesia has the largest plantation area, but only becomes the second largest natural rubber producer under Thailand in the world. Inline with this situation, 85 percent of it is belongs to small holder with relatively small scale area. Thus, to improve it's competitive advantages, supporting system in rubber agribusiness is needed. The objectives of this research were to 1) study the existing condition of supporting system in rubber agribusiness in Jambi Province, 2) study the role and function of supporting system of rubber agribusiness in Jambi Province. A descriptive and qualitative approach were used as well as farmers and supporting system's actors in rubber Agribusiness in Jambi Province were involved in this study. At least there were six primary supporting institutions in rubber Agribusiness namely auction market, farmer group/cooperatives, local government especially Estate Agency of Local Government, Cooperatives and Trade Agency of Local Government, financial institution, and association. Among those supporting institutions, auction market was counted as the most important in order to improve farmer welfare directly. Auction market was beneficial in giving fairness both in the process of weighing and determining quality of rubber and giving a higher price to farmer.

Keywords: *supporting subsystem, rubber, Jambi.*

ABSTRAK

Karet merupakan komoditas yang memberikan sumbangan ekonomi yang cukup besar di Indonesia. Meskipun memiliki areal penanaman karet terbesar di dunia, namun, baru mampu menempati posisi produsen terbesar kedua setelah Thailand. Selaras dengan itu, areal penanaman karet Indonesia 85 persen merupakan perkebunan rakyat dengan skala yang relative kecil. Dengan demikian, untuk meningkatkan daya saing karet rakyat diperlukan subsystem penunjang yang mampu memberikan peran secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengkaji *existing condition* lembaga penunjang dalam Agribisnis karet di Provinsi Jambi, 2) mengkaji peran dan fungsi lembaga penunjang Agribisnis karet di Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan petani serta aktor lembaga penunjang Agribisnis karet di Jambi. Terdapat enam kelembagaan utama yang mendukung agribisnis karet di Jambi yaitu: pelelangan, kelompok tani/koperasi, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan Perdagangan, lembaga keuangan, dan asosiasi. Diantara kelembagaan penunjang agribisnis karet di Jambi, yang paling berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani karet secara langsung adalah pelelangan. Pelelangan karet memberikan keuntungan diantaranya adalah keadilan dalam penimbangan dan penentuan mutu karet yang dihasilkan serta meningkatkan harga jual karet di tingkat petani.

Kata kunci: *subsystem penunjang, karet, dan Jambi.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Agribisnis abad ini ditengarai oleh arus globalisasi dengan tantangan dan kesempatan yang khas. Tantangan langsung berupa semakin tingginya tingkat persaingan akibat masuknya negara-negara dengan kekuatan ekonomi baru. Namun disisi lain munculnya kesempatan berupa tumbuhnya pasar-pasar baru secara signifikan.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi China, India, serta negara-negara Asia Pasifik, menimbulkan peningkatan signifikan akan permintaan terhadap karet dunia. Terlebih lagi terhitung sejak China tergabung dalam *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2002. Data dari Ditjen Pengolahan Hasil Pertanian, Kementan, menunjukkan telah terjadinya peningkatan konsumsi karet dunia. Jika pada tahun 2009 konsumsi karet dunia sebesar 9,277 juta ton, untuk tahun 2010 naik menjadi 10,664 juta ton. Sementara produksi karet mentah dunia hanya mampu mensuplai sebanyak 10,219 juta ton pada tahun 2010 naik dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebesar 9,702 juta ton karet alam atau minus sekitar 445.000 ton (Kementan, 2013).

Komoditas karet memberikan sumbangan ekonomi yang cukup besar di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari total ekspor karet Indonesia yang mencapai 2,38 juta ton dengan nilai sebesar 11,13 miliar US\$ pada tahun 2012. Negara tujuan ekspor merupakan negara-negara yang bergerak dalam industri ban yang didominasi kawasan Asia meliputi China, Korea, dan Jepang, disusul Amerika utara meliputi USA, Brazil, dan Eropa meliputi Turki, Prancis, Jerman, dan Belanda.

Indonesia juga tercatat memiliki areal penanaman karet terbesar di dunia. Namun demikian, Indonesia baru mampu menempati posisi produsen terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 26.31 persen dari total produksi dunia. Produsen terbesar dunia masih dikuasai oleh Thailand dengan kontribusi sebesar 31.27 persen. Adapun posisi ketiga ditempati Malaysia mencapai 9.03 persen. Kemudian disusul oleh China, Vietnam dan India yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 6.39 persen, 7.25 persen, dan 8.18 persen (ANRPC, 2013).

Luas areal penanaman karet di Indonesia mencapai 3,46 juta hektar dengan sebaran lima wilayah terbesar secara berurutan adalah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Jambi merupakan wilayah sentra produksi karet terbesar ketiga dengan pangsa luas lahan rata-rata selama lima tahun terakhir adalah 12,88 persen dan pangsa produksi sebesar 11,12 persen dari produksi total karet Indonesia. Sedangkan produktivitasnya sebesar 836,04 kg/ha/tahun yang masih berada di bawah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Tengah (Kementan, 2013).

1.2. Masalah Penelitian

Karet menjadi komoditas strategis bagi Provinsi Jambi karena menyumbang PDRB sebesar 17 persen dan juga menyumbang 30 persen dari total nilai ekspor pada tahun 2011. Luas areal karet Provinsi Jambi mencapai 649.404 hektar dengan produksi sebesar 288.981 ton dan menjadi tumpuan hidup 251.403 kepala keluarga petani. Perkebunan karet di Provinsi Jambi didominasi oleh perkebunan rakyat. Dari total 649.404 hektar lahan tersebut sebagian besar merupakan perkebunan karet rakyat mencapai 501.012 hektar (77 persen), sisanya milik badan usaha milik negara (BUMN) 4.698 hektar (22 persen) dan swasta 140.980 hektar (1 persen) (Dirjen Tanaman Perkebunan, 2012).

Besarnya sumbangan perkebunan karet rakyat yang mencapai 77% di Provinsi Jambi menarik untuk diperhatikan. Perkebunan rakyat sering identik dengan lemahnya permodalan, rendahnya penggunaan input berkualitas dan teknologi, serta lemahnya daya tawar petani terhadap pasar. Dalam kerangka sistem Agribisnis, tentunya perkembangan perkebunan rakyat tidak dapat dipisahkan dari keberadaan serta dukungan subsistem kelembagaan penunjang (*supporting institution*), selain hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*). Subsistem penunjang memberikan dukungan terhadap berjalannya sistem Agribisnis karet secara keseluruhan.

Keberadaan subsistem penunjang menjadi faktor pendukung kepentingan petani karet dari sisi kelembagaan. Pertanyaannya adalah lembaga penunjang Agribisnis karet apa saja yang ada di Provinsi Jambi? Bagaimana peranannya? Apakah keberadaan lembaga penunjang membantu dan memberikan manfaat bagi petani dalam menjalankan usahanya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memotret lembaga penunjang Agribisnis karet di Provinsi Jambi. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Mengkaji *existing condition* lembaga penunjang dalam Agribisnis karet di Provinsi Jambi, 2) Mengkaji peran dan fungsi lembaga penunjang dalam Agribisnis karet di Provinsi Jambi.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Davis dan Goldberg (1957) mendefinisikan agribisnis sebagai “*The sum total of all operations involved in the manufacture and distribution of farm supplies; production operations of the farm, processing, and distribution of farm commodities and items made from them*”. Agribisnis merupakan konsep dari suatu sistem yang integratif dari beberapa subsistem, yaitu: (1) subsistem pengadaan sarana produksi pertanian, (2) subsistem produksi usahatani, (3) subsistem pengolahan dan industri hasil pertanian (agroindustry), (4) subsistem pemasaran

hasil pertanian, dan (5) subsistem penunjang kegiatan pertanian. Penanganan pembangunan pertanian tidak dapat lagi hanya dilakukan terhadap aspek-aspek yang berada dalam subsistem on farm saja tetapi juga harus melalui aspek-aspek off farm secara integratif sehingga agribisnis merupakan sistem yang memiliki lingkup lebih luas dibandingkan dengan pertanian dalam arti luas.

Subsistem penunjang terdiri atas semua pemain utama yang menyediakan jasa, meskipun bersifat pilihan, namun sangat penting dalam menunjang keberhasilan berjalannya sistem Agribisnis. Jasa-jasa ini disediakan oleh pemerintah, asosiasi, kredit dan pembiayaan, lembaga penelitian, asosiasi, kelompok tani dan koperasi. Kelembagaan juga dapat didefinisikan dengan berbagai macam sudut pandang.

Ruttan (1985) mendefinisikan lembaga sebagai aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial, sedangkan organisasi adalah kesatuan sosial yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Kelembagaan dapat diartikan sebagai organisasi atau sebagai aturan main. Kelembagaan sebagai organisasi biasanya menunjuk pada lembaga-lembaga formal seperti Departemen Pertanian, Pemerintahan Daerah, Koperasi, Kelompok Tani, Bank dan sebagainya (Pakpahan, 1990). Kontribusi utama kelembagaan dalam pembangunan agribisnis adalah mengkoordinasikan, mengendalikan, atau mengontrol interdependensi antar partisipan (tenaga kerja, capital, management, dan lain-lain) dalam proses transformasi dari input menjadi output.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jambi. Lokasi penelitian dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa: 1) Provinsi Jambi sebagai salah satu sentra produksi karet nasional, 2) telah terjadi konversi lahan karet ke sawit secara signifikan. Adapun Kabupaten yang dipilih adalah Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Bungo dengan pertimbangan di dua lokasi tersebut terdapat pelelangan aktiv sebagai salah satu bentuk kelembagaan penunjang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-September.

3.2. Data

Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap petani karet sebanyak 105 responden, para pemangku kepentingan dan 180 aktor kelembagaan penunjang seperti koperasi, kelompok tani, lembaga penelitian, lembaga keuangan, pelelangan, dan pemerintah daerah. Data sekunder utama yang digunakan diperoleh dari *desk study* maupun instansi-instansi terkait seperti BPS, Dinas Perkebunan dan Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta sumber-sumber lain yang relevan. Penelitian ini akan melibatkan personal kunci pemangku kepentingan yang dipilih secara purposive sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.3. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara umum analisis substemen penunjang Agribisnis karet akan dikaji melalui tiga tahap: *scanning*, *analyzing*, dan *measuring*. *Scanning* merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi keberadaan substemen penunjang Agribisnis karet yang ada di lokasi penelitian. Langkah selanjutnya adalah *analyzing* untuk menganalisa kondisi substemen penunjang secara lebih mendalam. Tahap ketiga adalah *measuring* yaitu proses menilai performa dari substemen kelembagaan penunjang secara kualitatif. Data hasil wawancara dengan tokoh-tokoh kunci dan petani responden selanjutnya diolah secara tabulasi silang dengan bantuan *Microsoft excel* yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Agribisnis Karet di Jambi

Komoditas karet merupakan komoditas unggulan yang mendominasi aktivitas perkebunan rakyat di Jambi. Luas lahan perkebunan karet mencapai 653.160 hektar yang berarti mencapai 25,2 persen dari total wilayah Jambi dengan total produksi 298.786 ton pada tahun 2011. Penelitian ini dilaksanakan di dua kabupaten yaitu, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Bungo. Sebagian besar lahan pertanian Kabupaten Batanghari digunakan untuk perkebunan yang luasnya mencapai 191.486 hektar. Areal perkebunan lebih banyak digunakan untuk perkebunan karet dan kelapa sawit. Luas areal perkebunan karet pada tahun 2011 adalah 112.093 hektar, bertambah sebesar 474 hektar dibandingkan tahun 2010 atau meningkat 0,43 persen. Demikian halnya dengan Kabupaten Bungo lahan perkebunan mencapai 110.040 hektar. Areal perkebunan lebih banyak digunakan untuk perkebunan karet dan kelapa sawit. Luas areal perkebunan karet pada tahun 2012 adalah 97.625 hektar, dengan produksi sebesar 47.226 ton. Secara terinci kondisi produksi, luas areal, dan jumlah petani karet di Provinsi Jambi tahun 2011 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Areal, Produksi dan Jumlah Petani Karet Rakyat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2011

Kabupaten	Total Areal (Ha)	Produksi (Kg. 000)	Jumlah Petani (KK)
Batanghari	111.758	62.728	38.692
Muaro Jambi	57.985	2.965	14.951
Bungo	96.717	31.378	44.746
Tebo	112.002	48.969	53.483
Merangin	127.703	52.753	5.649
Sarolangun	118.399	54.223	3.096
Tanjab Barat	15.931	6.861	5.719
Tanjab Timur	7.705	216	5.104
Kerinci	1.204	259	1.258
Jumlah Total	649.404	288.981	251.403

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2012

Secara umum perkebunan karet di Provinsi Jambi didominasi oleh perkebunan rakyat. Adapun penguasaan lahan karet rakyat petani di lokasi penelitian rata-rata adalah 3,63 hektar. Perkebunan rakyat di Provinsi Jambi masih menyerupai hutan karet dengan produktivitas 882 kg/ha/tahun. Ditenggarai rendahnya produktivitas karet disebabkan oleh rendahnya kualitas bibit karet serta pemeliharaan tanaman yang belum intensif.

Selain itu, kualitas bahan olahan karet (bokar) petani juga masih rendah. Hal ini terjadi karena teknik penanganan pasca panen serta pengolahan latek masih sangat sederhana. Bokar yang dihasilkan dan dijual oleh petani berupa *slab* tebal dengan pengolahan secara tradisional. Beberapa cara yang pengolahan/pembekuan latek yang dilakukan petani menggunakan cuka para, pupuk Phospat, dan secara alami. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, menunjukkan bahwa kualitas slab masih belum memenuhi persyaratan mutu berdasar K3 (kadar karet kering) dan kadar kontaminan.

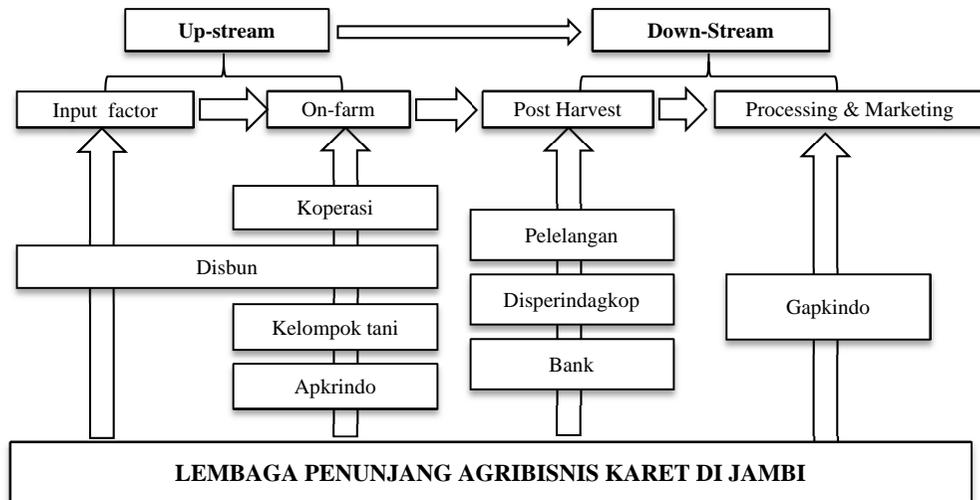
Ada dua hal yang mendasari perilaku petani melakukan penambahan kontaminan pada bokar. Pertama adalah petani dengan sengaja melakukan kecurangan untuk meningkatkan berat bokar. Kedua adalah penambahan kontaminan dilakukan petani ini sebagai cara untuk mengimbangi perilaku tengkulak yang berupaya melakukan kecurangan pengurangan timbangan. Sebaliknya, tengkulak melakukan pengurangan timbangan sebagai akibat dari anggapan tengkulak bahwa petani melakukan penambahan kontaminan untuk meningkatkan berat. Dengan demikian telah terjadi kondisi saling ketidakpercayaan (*distrust*) antara petani dan tengkulak yang pada akhirnya memperburuk kualitas bokar yang dihasilkan.

Rendahnya kualitas bokar yang dihasilkan petani selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya biaya pengolahan bokar oleh pabrik pengolahan (*crumb rubber*) karena diperlukan upaya pembersihan yang lebih ketat dan diperlukan mesin tambahan untuk membersihkan bokar. Akibatnya pabrik pengolahan membeli bokar dengan harga yang relative lebih rendah untuk mengimbangi tingginya biaya pengolahan serta untuk mengantisipasi tingginya kontaminasi bokar.

4.2. Identifikasi Lembaga Penunjang Agribisnis Karet

Agribisnis adalah sistem yang terdiri atas subsistem yang saling terkait satu sama lain. Diantaranya adalah subsistem hulu (*upstream*), subsistem hilir (*downstream*), subsistem usahatani (*onfarm*), dan subsistem penunjang (*supporting*). Sistem agribisnis tidak akan dapat berjalan baik jika di dalamnya tanpa disertai lembaga penunjang. Lembaga penunjang memiliki peran yang besar dalam pengembangan agribisnis. Adapun lembaga penunjang agribisnis karet yang ada di lokasi penelitian meliputi: pelelangan, kelompok tani/koperasi, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perkebunan,

Dinas Koperasi dan Perdagangan, Lembaga Keuangan, dan Asosiasi. Keterkaitan subsistem agribisnis karet di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Lembaga Penunjang Agribisnis Karet di Jambi

4.2.1. Pelelangan

Pelelangan merupakan kelembagaan penunjang agribisnis karet yang berperan dalam fungsi pemasaran. Pelelangan merupakan mekanisme interaksi antara permintaan dari konsumen langsung yang dapat berupa pedagang, pabrik pengolah, eksportir, atau pihak lain, dengan penawaran langsung dari petani dimana harga transaksi adalah harga permintaan yang tertinggi yang ditentukan secara transparan. Pelelangan didirikan atas inisiasi dari dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Koperasi untuk menjawab tantangan rendahnya harga karet di tingkat petani. Pelelangan memiliki fungsi yang sangat penting dalam membantu petani karet dalam memperoleh harga jual karet yang lebih tinggi serta meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai pemasaran karet mengingat bahwa dalam sistem agribisnis secara umum petani biasanya menempati posisi yang paling lemah. Keragaan pasar lelang di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 2.

Kondisi di lokasi penelitian menunjukkan bahwa sebelum ada pelelangan, petani menjual karet sadapan kepada tengkulak yang membeli langsung ke rumah-rumah petani. Harga yang diterima petani lebih rendah dari harga pasar dengan selisih harga bisa mencapai Rp. 2.000 - Rp.3.500/kg. Disamping harga yang lebih rendah, petani juga bertindak sebagai *price taker* dengan posisi tawar yang rendah karena tidak memiliki alternatif saluran pemasaran. Disamping itu, kualitas karet juga ditentukan secara sepihak oleh tengkulak yang meliputi kadar karet kering (K3) dan tingkat kontaminasi

dari unsur-unsur lain. Selain itu, petani harus menerima pemotongan berat timbangan dengan asumsi bahwa karet berkualitas rendah dan terkontaminasi.

Adanya pelelangan karet dapat memberikan keuntungan kepada dua belah pihak. Petani mendapatkan keuntungan harga yang lebih tinggi sebagai akibat persaingan diantara pembeli. Disisi lain pembeli mendapatkan karet dengan kualitas yang lebih baik karena harga karet juga tergantung kualitasnya. Dengan demikian petani tidak hanya mengejar kuantitas namun juga kualitas. Selanjutnya, kualitas karet yang lebih baik ini akan menguntungkan pihak pabrik pengolahan karena mengurangi aktivitas dalam pengolahan karet sehingga memangkas biaya pengolahan.

Tabel 2. Pasar Lelang Karet (PLK) di Provinsi Jambi

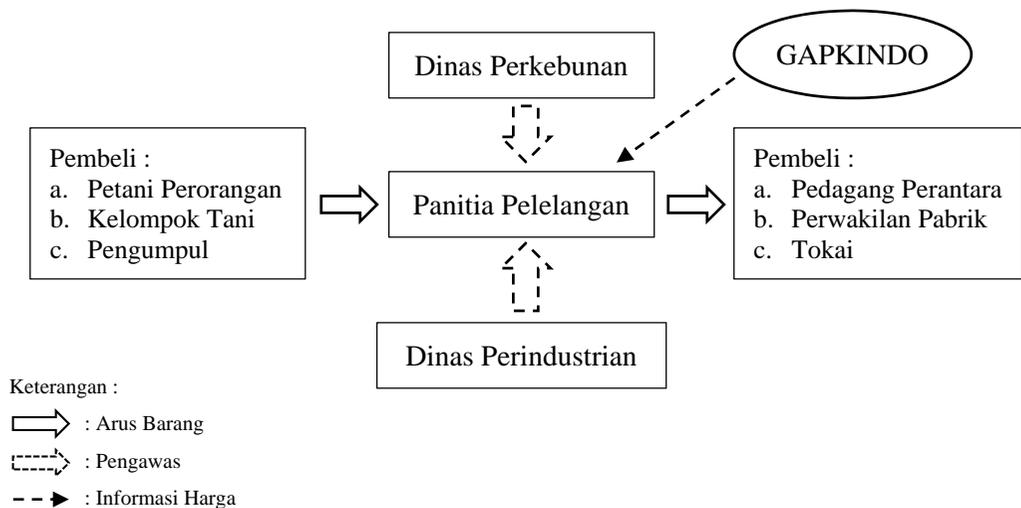
Kabupaten	No	Nama PLK	Jadwal Lelang
Bungo	1	Senamat	Selasa
	2	Lubuk Landai	Kamis
	3	Tanjung Agung	Senin
	4	Koto Jayo	Kamis
	5	Babeko	Senin
	6	Jujuhan	Sabtu
	7	Rantau Pandan	Minggu
Tebo	1	Alai Hilir	Rabu
	2	Semabu	Minggu
	3	Sumber Jaya	Selasa
	4	KUD Subur Jaya	Kamis
	5	KUD Karya Putra Serumpun	Minggu
	6	Koperasi Amarta	Jum'at
Muaro Jambi	1	Koperasi Fajar	Senin
Batanghari	1	Panerokan	Rabu
	2	Ladang Peris	Senin
	3	Bajubang	Senin
	4	Simpang Rantau Gedang	Tidak aktif
Sarolangun	1	Simpang Pelawan	Tidak aktif
Merangin	2	Tabir	Tidak aktif

ket: lelang dilaksanakan dua minggu sekali secara bergiliran pada satu kabupaten

Ada lima (5) pihak yang terlibat dalam proses pelelangan, yaitu: penjual, pembeli, panitia lelang, pengawas yang terdiri atas Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, dan Gapkindo (Gabungan Perusahaan Karet Indonesia). Penjual terdiri atas petani perorangan, kelompok tani, ataupun pedagang perantara (tengkulak). Adapun jumlah penjual rata-rata di setiap tempat pelelangan adalah 90 peserta. Pembeli adalah pedagang perantara dan perwakilan pabrik pengolahan karet. Adapun rata-rata jumlah pembeli di setiap pasar lelang sebanyak lima orang. Pembeli harus mendaftarkan diri untuk mengikuti pelelangan lima belas (15)

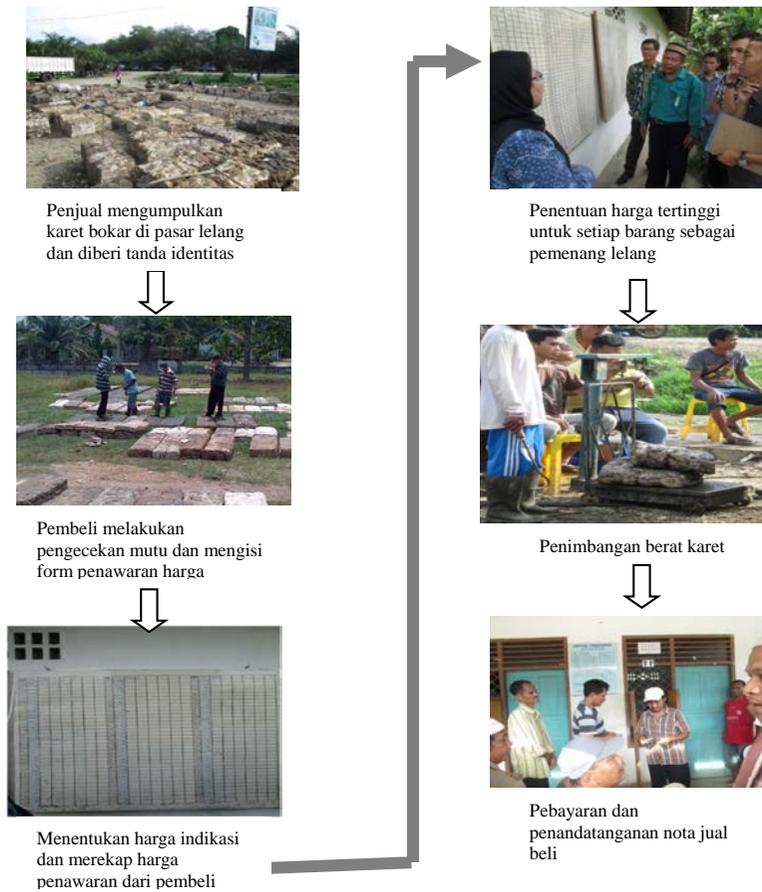
hari sebelum proses pelelangan. Secara terinci, pelaku pelelangan disajikan pada Gambar 2.

Panitia lelang terdiri atas perwakilan kelompok tani ataupun petani mandiri yang berada di sekitar lokasi pelelangan. Dalam pelaksanaan lelang, panitia didampingi oleh pengawas yang terdiri atas perwakilan dari Dinas Perkebunan dan juga dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Gapkindo (gabungan perusahaan karet Indonesia) memiliki peran dalam memberikan informasi harga komoditas karet secara *real time*. Dengan demikian petani dapat mengetahui harga karet sebelum menentukan apakah akan menjual karetnya pada hari itu atau dihari yang lain. Informasi harga juga membantu petani dengan menjadikan harga Gapkindo sebagai acuan dalam proses lelang. Jika saja harga tertinggi dari pembeli dianggap tidak sesuai dengan harga pasar, petani berhak untuk membatalkan penjualannya. Adapun biaya lelang yang harus ditanggung petani sebesar 2 kg karet dari setiap transaksi atau Rp. 40,-/kg. Penggunaan biaya lelang dialokasikan untuk kelompok tani/koperasi Rp. 4,- untuk kas desa sebesar Rp. 21,- dan untuk kegiatan operasional lelang sebesar Rp.15,-.



Gambar 2. Pelaku Pelelangan Karet di Jambi

Pelelangan berlangsung menggunakan mekanisme lelang tertutup, setiap calon pembeli tidak mengetahui harga pembelian pembeli lainnya. Setiap pembeli menuliskan harga penawaran pada setiap nomor barang dengan terlebih dahulu setiap pembeli mengecek kondisi barang tersebut. Pembeli dengan harga tertinggi untuk setiap barang dinyatakan sebagai pemenang lelang. Proses pelelangan secara terperinci dapat disajikan pada Gambar 3.

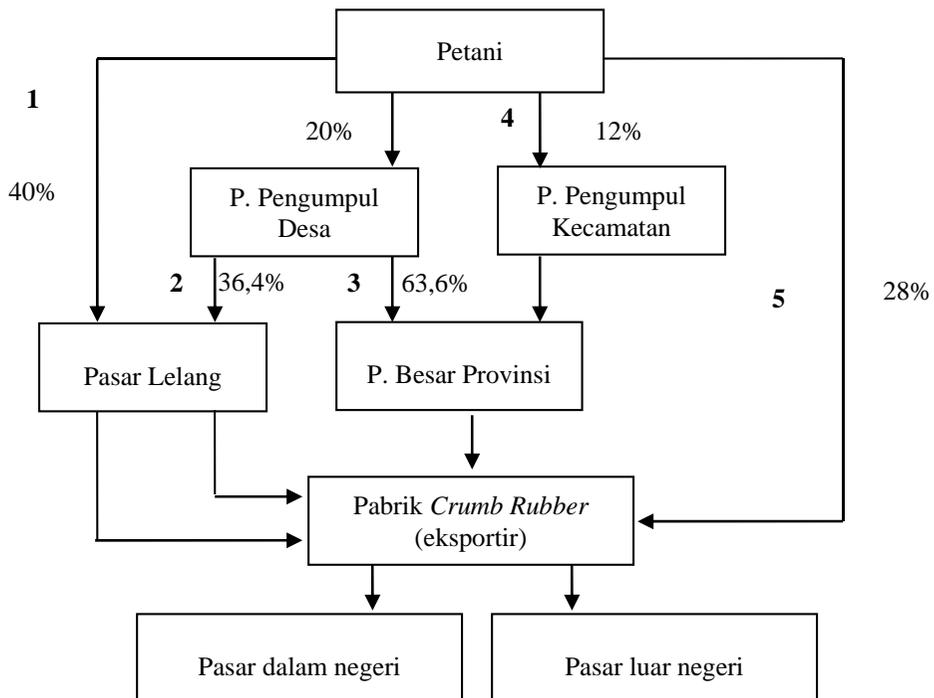


Gambar 3. Alur Proses Pelelangan Karet di Provinsi Jambi

Jenis karet dijual dalam lelang adalah karet *slab* dengan ukuran rata-rata panjang 100 cm, lebar 30 cm, dan tebal 10-20 cm. Namun demikian, tidak ada standar ukuran dan berat karet yang dilelang. Meskipun pada awalnya ada standar ukuran karet *slab* yang harus diikuti namun sudah tidak digunakan oleh petani. Alasannya adalah selisih harga antara ukuran standar dengan yang tidak standar dianggap tidak signifikan bagi petani. Sementara proses produksi untuk menghasilkan ukuran standar membutuhkan upaya yang lebih besar.

Untuk mendapatkan informasi manfaat pelelangan dalam pemasaran karet, maka analisis saluran pemasaran dilakukan. Berdasarkan analisis saluran pemasaran karet yang disajikan pada Gambar 4 dapat diketahui bahwa harga tertinggi yang diperoleh petani adalah melalui saluran lima yaitu langsung dijual ke pabrik pengolahan karet (*crumb rubber*) yang mencapai Rp. 12.900 per kg sedangkan harga tertinggi kedua diperoleh petani melalui saluran satu yaitu melalui pasar lelang yang mencapai Rp. 11.450 per kg. Meskipun melalui saluran lima petani memperoleh harga tertinggi,

namun hanya 28% petani saja yang menjual langsung ke pabrik. Hal ini terjadi karena penjualan ke pabrik hanya dilakukan oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani/koperasi. Disamping itu penjualan langsung ke pabrik dapat dilakukan setelah ada kesepakatan antara kelompok tani dengan pabrik *crumb rubber*.



Gambar 4. Saluran Pemasaran Karet di Provinsi Jambi, Tahun 2013

Berdasarkan gambar 4 tersebut di atas, terlihat bahwa pemasaran karet relatif menyebar di lima saluran pemasaran dengan saluran pertama memiliki biaya pemasaran tertinggi yang mencapai Rp. 234,00 / kg. Adapun biaya pemasaran terendah ada pada saluran 2 dan saluran 3 yaitu Rp. 125,00/kg. Dilihat dari harga di tingkat petani maka saluran 5 memiliki harga di tingkat petani yang paling tinggi yaitu Rp. 12.900,00 /kg, sedangkan harga terendah di tingkat petani ada pada saluran 3 yaitu Rp. Rp. 9.350,00/kg.

Pelelangan memiliki peran yang sangat penting dalam mensejahterakan petani karet di lokasi penelitian. Setidaknya ada lima (5) peran penting pelelangan di lokasi penelitian yaitu: 1) memberikan kesempatan petani memperoleh harga yang lebih tinggi sebagai akibat dari persaingan para pembeli, 2) memberikan keadilan (*fairness*) dalam proses penimbangan karena diawasi bersama, 3) harga di pelelangan juga menjadi harga acuan bagi petani yang menjual ke tengkulak, 4) pelelangan dapat meningkatkan efisiensi tataniaga karena memotong saluran pemasaran, dan 5) mendorong

peningkatan mutu karet petani karena harga karet di pelelangan ditentukan berdasarkan kualitas. Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa terdapat petani yang menjual ke pasar lelang yang relatif menerima harga di tingkat petani dengan harga tertinggi kedua.

Tabel 3. Harga dan Biaya Pemasaran di Tingkat Petani di Provinsi Jambi, Tahun 2013

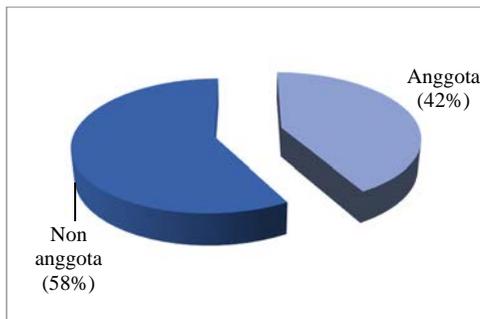
Saluran	Harga tingkat petani (Rp/kg)	Biaya pemasaran (Rp/kg)
Saluran 1	11.450	235,00
Saluran 2	9.600	125,00
Saluran 3	9.350	125,00
Saluran 4	9.500	165,50
Saluran 5	12.900	135,75

4.2.2. Kelompok Tani dan Koperasi

Kelompok tani dan koperasi merupakan kelembagaan yang penting pada Agribisnis karet di Jambi sebagai wadah kolektif kelembagaan petani. Kelompok tani dan koperasi menjadi sarana bagi pemerintah khususnya Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam melakukan penyuluhan, pembinaan serta pelaksanaan program dan penyaluran bantuan pemerintah untuk petani.

Kelompok tani dibentuk oleh Dinas Perkebunan untuk memperkuat kerjasama antar petani dan untuk memudahkan dalam pembinaan, penyuluhan, dan penyaluran bantuan. Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi juga memiliki kepentingan untuk menumbuhkembangkan koperasi. Selain itu ada kebutuhan untuk menyalurkan dana bantuan pemerintah yang hanya bisa dilakukan melalui koperasi. Oleh karena itu, di dalam kelompok tani itu dibentuk koperasi yang anggotanya adalah juga anggota kelompok tani. Pemisahan antara kelompok tani dan koperasi tidak bisa dilakukan karena koperasi berada dalam kelembagaan kelompok tani.

Selanjutnya dalam pembahasan ini penulis tidak memisahkan antara koperasi dan kelompok tani untuk memudahkan analisa. Sebagaimana tercantum pada gambar 5, berdasarkan hasil wawancara dengan petani karet, dari total 105 petani responden terdapat 44 orang atau 42 persen merupakan anggota kelompok tani/koperasi. Sedangkan sebanyak 61 orang atau 58 persen masih belum bergabung dengan kelompok tani/koperasi. Rata-rata petani responden telah bergabung menjadi anggota kelompok tani/ koperasi selama 3 tahun.



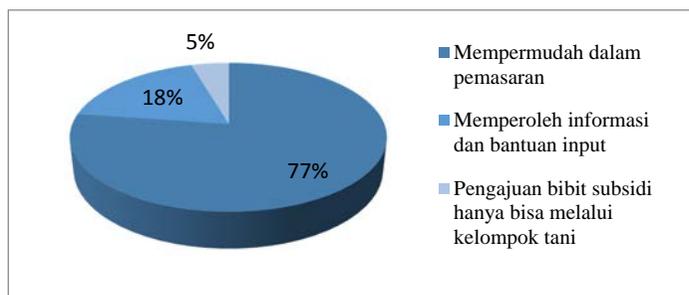
Gambar 5. Keanggotaan Dalam Kelompok Tani/Koperasi



Gambar 6. Peran Kelompok Tani/Koperasi

Peran kelompok tani/ koperasi yang dirasakan oleh petani adalah terutama dalam fungsi simpan pinjam dan memfasilitasi penjualan ke pabrik. Dari total responden yang menjadi anggota kelompok tani/koperasi sebanyak 75 persen responden mendapatkan fasilitas untuk melakukan penjualan langsung ke pabrik. Sementara itu terdapat 7 persen responden yang menggunakan fasilitas simpan pinjam dari kelompok tani/koperasi. Selain itu melalui kelompok tani/koperasi petani dapat melakukan penjualan langsung ke pabrik pengolahan karet (*crumb rubber*) dengan demikian petani dapat memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Secara terinci, peran kelompok tani/koperasi dapat dilihat pada gambar 6.

Terdapat tiga (3) alasan utama petani bergabung ke dalam kelompok tani/koperasi, yaitu 1) mempermudah dalam pemasaran dan memperoleh bantuan dari pemerintah, 2) memperoleh informasi dan bantuan input, 3) pengajuan bibit bersubsidi hanya bisa melalui kelompok tani. Sebanyak 77 persen responden bergabung menjadi anggota kelompok tani/koperasi adalah karena alasan untuk memperoleh kemudahan dalam pemasaran. Sementara alasan untuk memperoleh informasi dan bantuan input sebesar 18 persen. Sebesar 5 persen responden bergabung menjadi anggota kelompok tani/koperasi adalah untuk mengakses bantuan bibit bersubsidi. Secara terinci, alasan petani bergabung dalam kelompok tani/koperasi disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Alasan Bergabung dalam Kelompok Tani/Koperasi

Untuk menunjang aktivitas kelompok tani/koperasi, setiap anggota kelompok tani/koperasi membayar iuran keanggotaan dalam bentuk simpanan pokok yang dibayarkan sekali pada saat pendaftaran rata-rata sebesar Rp. 33.276 dan simpanan wajib rata-rata Rp. 26.207 yang dibayarkan tiap bulan. Selain itu juga masih terdapat simpanan sukarela yang besarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Setiap akhir tahun kepengurusan setiap anggota mendapatkan sisah hasil usaha (SHU) rata-rata sebesar Rp. 120.000. Meskipun nilai SHU relatif kecil namun keuntungan yang dirasakan petani anggota bukan hanya terbatas pada SHU. Petani memperoleh keuntungan dalam bentuk lain seperti halnya kemudahan dalam pemasaran karet karena difasilitasi oleh kelompok tani/koperasi dalam proses pemasarannya, petani anggota juga mendapatkan harga jual yang lebih tinggi karena melalui kelompok tani/koperasi petani dapat menjual langsung ke pabrik pengolahan karet (*crumb rubber*), selain itu petani anggota juga memperoleh bantuan input usahatani misalnya bibit berkualitas.

4.2.3. Asosiasi

Terdapat dua asosiasi karet di Provinsi Jambi yaitu Gapkindo dan Apkarindo. Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) adalah sebuah asosiasi perusahaan Indonesia yang berkaitan dengan produksi dan pengolahan karet. Tujuan Gapkindo adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran karet alam Indonesia sebagai salah satu produk ekspor yang penting di Indonesia. Anggota Gapkindo terdiri dari perkebunan karet (milik negara, swasta nasional maupun asing-modal), prosesor, eksportir, pedagang. Pada Juli 2012 total jumlah anggota Gapkindo adalah 160 perusahaan. Adapun anggota Gapkindo cabang Jambi terdiri atas 10 perusahaan.

Keberadaan Gapkindo memiliki peranan strategis dalam pengembangan Agribisnis karet. Meskipun aktivitas Gapkindo cenderung untuk membela kepentingan industri pengolahan namun aktivitas Gapkindo juga memberikan kontribusi untuk mengembangkan Agribisnis karet secara keseluruhan. Aktifitas Gapkindo secara umum diantaranya adalah memberikan informasi harga indikasi karet ke masyarakat, mendukung pemerintah dalam program Gerakan Nasional Karet Indonesia, kampanye produksi Bokar Karet bersih, mewakili pemerintah di forum internasional, meningkatkan harga karet di tingkat internasional, dan branding karet Indonesia.

Gapkindo juga menetapkan harga karet yang berupa harga indikasi. Harga indikasi merupakan harga yang disepakati oleh perusahaan *crumb rubber* anggota Gapkindo dimana harga yang ditetapkan disepakati 85% dari harga ekspor dalam Rp/kg dengan kadar karet kering 100%. Harga yang ditetapkan tersebut kemudian diinformasikan melalui Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Jambi. Selain itu petani juga dapat mengakses secara langsung harga indikasi ke Gapkindo cabang Jambi.

Selain Gapkindo, juga terdapat asosiasi lain yaitu Apkarindo (asosiasi petani karet Indonesia). Sesuai dengan namanya maka konstituen dari Apkarindo adalah petani karet. Adapun aktivitas yang dilakukan meliputi advokasi terhadap kebijakan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani karet diantaranya meliputi kebutuhan input berkualitas dan kebijakan harga jual karet. Namun demikian, penulis tidak menemukan kegiatan kedua Asosiasi ini yang langsung bersentuhan dengan petani di lapangan.

4.2.4. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berperan dalam pembuatan kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan pengembangan agribisnis karet baik ditingkat *on farm* maupun *off farm*. Pemerintah daerah yang kebijakannya bersentuhan langsung dengan agribisnis karet adalah Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Dinas perkebunan menghasilkan kebijakan terkait agribisnis karet meliputi bidang produksi, pembiayaan, kelembagaan, dan pemasaran. Peran dalam bidang produksi diantaranya adalah; 1) program pengembangan bibit unggul yang dilakukan meliputi: pembinaan penangkar benih, pemurnian bibit, bantuan pengadaan bibit karet. 2) program peremajaan tanaman karet dan rehabilitasi lahan, dan revitalisasi perkebunan karet, 3) pengembangan areal karet, dan 4) advokasi pembangunan jalan usahatani.

Peran dalam pembiayaan yang diperankan Dinas Perkebunan adalah pemberian dana talangan untuk kelompok tani yang mencapai Rp. 50 juta per kelompok. Dana talangan ini untuk membantu petani agar bisa menjual karet dengan harga lebih tinggi. Hal ini dilakukan atas dasar kebiasaan petani menjual kasil sadapan kepada tengkulak karena adanya desakan kebutuhan ekonomi. Selain itu ada program revitalisasi karet dengan fasilitas dana bantuan berupa kredit yang mulai dibayarkan beban cicilan mulai tahun ke 7 atau saat tanaman mulai berproduksi. Pembiayaannya mencapai Rp. 36 juta per ha yang disalurkan melalui bank BRI. Program ini sudah berhasil mengikutsertakan 170 kk petani atau 429,49 hektar lahan karet. Selain itu masih terdapat program perluasan areal tanaman karet dengan dana bantuan Rp. 7 juta per orang per hektar.

Dalam mengembangkan kelembagaan Dinas Perkebunan melakukan kebijakan dalam penguatan kelembagaan petani, diataranya adalah pembentukan kelompok tani karet, pembangunan pelelangan (bekerjasama dengan dinas perindagkop), dan pembinaan dan penyuluhan pengolahan karet. Sedangkan peran dalam pemasaran Dinas Perkebunan juga melakukan fungsi beberapa kebijakan. Kebijakan terkait pemasaran yang dilakukan meliputi inisiasi pembangunan pelelangan karet, memfasilitasi petani dengan Gapkindo untuk memperoleh informasi update harga, memfasilitasi pabrik pengolahan untuk mengikuti lelang di pelelangan, serta memfasilitasi kerjasama antara kelompok tani dengan pabrik pengolahan.

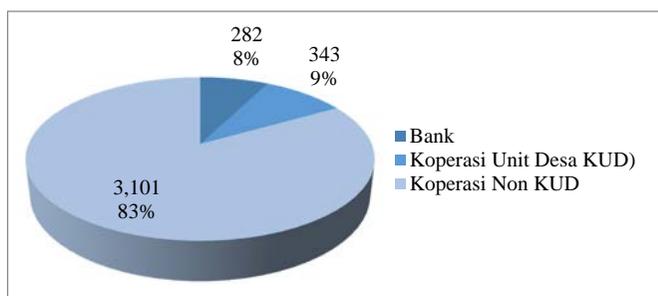
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi berperan serta dalam mengembangkan pembiayaan dalam Agribisnis karet di Jambi. Diantaranya adalah menyalurkan bantuan dana talangan ke tiap kelompok tani yang dikelola oleh koperasi kelompok tani. Besarnya dana talangan ini mencapai Rp. 50 juta per kelompok. Peran dalam penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh dinas adalah membangun koperasi petani karet. Koperasi didirikan berbasis kelompok tani sebagai sarana menyalurkan dana bantuan berupa dana talangan pemasaran karet.

Peran dalam Pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi adalah membangun tempat pelelangan karet dan melakukan pembinaan serta pengawasan berjalannya pelelangan. Selain itu, bersama dengan Dinas Perkebunan melakukan upaya pemasaran karet petani diantaranya adalah memfasilitasi pabrik pengolahan untuk mengikuti lelang di pelelangan dan memfasilitasi kerjasama antara kelompok tani dengan pabrik pengolahan agar kelompok tani dapat langsung menjual ke pabrik.

4.2.5. Lembaga Keuangan

Tanaman karet merupakan tanaman tahunan yang baru menghasilkan pada tahun ke tujuh. Dengan demikian diperlukan waktu investasi jangka panjang untuk mendapatkan hasil pengembalian. Pohon karet baru bisa berproduksi pada tahun ke-7. Dengan demikian diperlukan pembiayaan yang terjadi mulai penanaman hingga akhir tahun ke-6 yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan lembaga keuangan yang bisa memenuhi kebutuhan petani.

Sebagai subsistem penunjang Agribisnis, lembaga keuangan memiliki peran yang penting dalam melakukan fungsi pembiayaan. Hingga tahun 2012 tercatat 347 unit kantor bank, terdiri dari 1 unit kantor pusat, 53 unit kantor cabang, 238 unit kantor cabang pembantu, dan 55 unit kantor kas. Jumlah ini naik 23,05 persen dibandingkan tahun 2011. Sedangkan lembaga keuangan lain terdapat KUD sebanyak 343 unit dan koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam/unit simpan pinjam sebanyak 3.101 unit. Jenis lembaga keuangan yang ada di Provinsi Jambi disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8. Lembaga keuangan di Propinsi Jambi

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2013

Lembaga keuangan selain sebagai sumber pembiayaan bagi pelaku agribisnis karet, juga berfungsi sebagai mitra pemerintah sebagai penyalur dana program. Di lokasi penelitian lembaga keuangan yang terlibat aktif dalam penyaluran bantuan pemerintah adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Danamon, dan Bank Perkreditan Rakyat. Sebagai contoh Bank BRI menyalurkan dana bantuan pemerintah dalam program revitalisasi dan peremajaan karet sebagaimana telah dijelaskan di depan. Setiap petani memperoleh dana pinjaman mencapai Rp.36 juta/ha dengan bunga rendah disubsidi pemerintah. Petani mulai membayar cicilan mulai tahun ke-7 saat tanaman karet mulai berproduksi.

Berdasarkan hasil wawancara rata-rata kebutuhan petani responden untuk usahatani karet adalah Rp. 13.980.476. Selain itu ditemukan hanya 2,86 persen responden yang mengakses pembiayaan dari luar berupa kredit program dari pemerintah. Sebanyak 97,14 persen responden menggunakan dana sendiri untuk investasi perkebunan karet. Rata-rata dana yang diakses dari dana program pemerintah sebesar Rp. 5.300.00. Berdasar hasil analisis ditemukan sebanyak 40,95 persen responden mengakses lembaga keuangan dan memiliki tabungan di bank, yaitu Bank BRI, bank BNI, dan bank Mandiri. Adapun rata-rata besarnya tabungan adalah Rp. 5.537.000. Selain itu ditemukan 12,38 persen responden menabung di lembaga keuangan non formal yaitu arisan dengan besaran rata-rata Rp. 3.576.923. Alasan menabung pada arisan adalah untuk simpanan anak sekolah dan untuk kebutuhan tak terduga di masa depan. Namun demikian tidak ditemukan responden yang mengakses pembiayaan dari kelompok tani/koperasi. Artinya kelompok tani/koperasi belum mengoptimalkan fungsi pembiayaan bagi anggotanya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat enam kelembagaan utama yang mendukung agribisnis karet di Jambi yaitu: Pelelangan, Kelompok Tani/koperasi, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Lembaga Keuangan, dan Asosiasi.

Kelembagaan penunjang tersebut satu sama lain saling terkait, dan masing-masing kelembagaan berfungsi saling mempengaruhi kelembagaan lainnya. Diantara kelembagaan penunjang agribisnis karet di Jambi, yang paling berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani karet secara langsung adalah pelelangan karet. Pelelangan karet memberikan keuntungan setidaknya adalah meningkatkan harga jual karet di tingkat petani dan keadilan dalam penimbangan serta penentuan mutu karet.

Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani karet dan menunjang efisiensi pemasaran karet, maka perlu ditingkatkan pembangunan pasar lelang karet. Selain itu fasilitas pelelangan juga perlu ditingkatkan diantaranya alat penimbangan, sistem komputer, dan sarana kantor pasar lelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Natural Rubber Producing Country (ANRPC)*. 2013. <http://www.anrpc.org/>. diakses pada 3 Mei 2013.
- BPS Jambi. 2013. Jambi Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.
- Davis, J.H and Golberg R.A. 1957. *A Concept of Agribusiness*. Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University.
- Dirjen Tanaman Perkebunan. 2012. Statistik Tanaman Perkebunan, Kementerian Pertanian RI.
- Kementan, 2013. Pusat Data Statistik Pertanian. Jakarta (www.deptan.go.id) diakses pada 3 Mei 2013.
- Kementan. 2013. Potensi dan Perkembangan Pasar Ekspor Karet Indonesia di Pasar Dunia. http://pphp.deptan.go.id/disp_informasi/1/5/54/1185/potensi_dan_perkembangan_pasar_ekspor_karet_indonesia_dipasar_dunia.html. diakses pada 3 Mei 2013.
- Pakpahan, A. 1990. Permasalahan dan Landasan Konseptual dalam Rekayasa Institusi (Koperasi). Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Litbang Departemen Pertanian. Bogor.
- Ruttan, Vernon W. 1985. Tiga Kasus Terjadinya Pembaruan Kelembagaan. Dalam Kasryno, Faisal dan Stepanek, Joseph F (Penj). *Dinamika Pembangunan Pedesaan*. Yayasan Obor Indonesia dan Penerbit PT Gramedia. Jakarta
- Scott, Richard. 2008. *Institutions and Organizations. Third Edition. SAGE Publications, Inc.* Stanford University, USA.